

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan suatu fungsi pemerintah. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi. Partai politik merupakan ciri utama sistem politik yang demokratis. Sedangkan salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh partai politik mengingat masih banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya masih sangat minim atau rendah.

Partai politik mempunyai peran dalam pelaksanaan pendidikan politik dan berkewajiban dalam pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana UU No. 2 tahun 2011 dalam pasal 31 ayat 1 sebagai berikut: partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan falsafah bangsa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Banyak dijumpai generasi muda atau pemuda desa yang masih enggan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan di desa terutama pada saat adanya pemilihan. Permasalahan ini sering muncul adalah para pemuda desa sering golput dalam pemilihan di desa karena mereka sering berpikir bahwa tidak penting untuk mengikuti pemilihan tersebut, tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa tokoh yang mereka pilih dalam pemilihan tersebut akan buruk

kinerjanya. Karena banyaknya spekulasi negatif di benak para generasi muda itulah yang membuat mereka enggan ikut berkecimpung dalam jalannya politik di desa. Kurangnya pengalaman maupun wawasan tentang pendidikan politik juga menjadi factor pemicu generasi muda menjadi pasif dalam partisipasi aktif dalam politik maupun kegiatan di desa.

Tingkat partisipasi politik dalam pemilu merupakan hal yang turut menentukan keberhasilan pemilu. Menurut data pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden diadakan jumlah penduduk yang berhak memilih menggunakan hak pilihnya dalam pemilu adalah sebagai berikut:

pada tahun 2004 ada sejumlah 66,14% penduduk yang berhak memilih menggunakan hak pilihnya, pada tahun 2009 sebesar 73,46%, pada tahun 2014 ini sebesar 75,82%. Angka partisipasi masyarakat Indonesia ini termasuk rekor tertinggi di dunia kecuali jika dibandingkan dengan hasil Referendum yang terjadi di Irak yang mengukuhkan kembali Saddam Hussein pada tahun 1995 (Fattah, 1997 : 20)

Untuk membina generasi muda di dalam kehidupan politik diperlukan proses pendidikan politik yang terencana sehingga partai dapat menghasilkan politisi-politisi masa depan yang lebih berkualitas. Dengan kata lain tujuan pendidikan politik yang akan dilaksanakan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, aspek kognitif untuk membangun pengetahuan warga negara (masyarakat sipil) tentang konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan. Kedua, aspek afektif untuk membentuk karakter warga negara (masyarakat sipil) yang berpihak kepada demokratisasi dan jati dirinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. ketiga, aspek psikomotorik untuk membangun kecakapan intelektual dan moral dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis.

Untuk meningkatkan partisipasi generasi muda secara kuantitas maupun kualitas diperlukan proses pendidikan politik secara terus menerus dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik serta menyadarkan individu akan perannya sebagai partisipan politik. Maka dari itu materi-materi yang berisi pengenalan partai kepada generasi muda mutlak diperlukan mengingat salah satu

tujuan partai politik melakukan pendidikan politik kepada generasi muda adalah memberikan wawasan tentang partai, visi, misi, ideologi perjuangan, dan program partai sehingga generasi muda memahami apa yang diperjuangkan suatu partai, mengapa mereka memilih partai tersebut, nilai-nilai apa saja yang akan dibawa oleh tokoh partai tersebut ketika kelak mereka duduk di lembaga legislative. Sedangkan bagi generasi muda kader partai, menteri-menteri tersebut berguna bagi mereka untuk membentuk militansi terhadap partai.

Materi-materi yang berisi penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara juga penting diberikan karena memperkuat rasa nasionalisme, membentuk nation and character building, cinta tanah air, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan kemajemukannya dan tetap dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi-materi yang menyangkut sistem pemilu beserta peraturan-peraturan yang ada dalam rezim pemilu memberikan wawasan kepada generasi muda tentang seluk beluk pemilu, bagaimana urgensi pemilu dalam suatu negara dan suksesi kepemimpinan. Bagaimana sistem pemilu yang demokratis yang mampu menjamin rasa kepastian hukum dan keadilan, tidak saja bagi penyelenggara tetapi juga para pemilih yang telah berupaya menjalankan hak demokrasi. Pada bagian ini akan diberikan pemahaman tentang hakekat dan arti penting pemilu itu sendiri.

Materi-materi tentang etika politik, partisipasi politik, sistem pemerintahan dan peran generasi muda dalam sistem politik merupakan materi-materi yang diperlukan bagi generasi muda menyangkut isu-isu sosial politik terkini. Materi ini diyakini dapat membangun wawasan generasi muda agar cerdas dalam berpolitik. Termasuk memahami dan sadar akan arti pentingnya generasi muda sebagai generasi penerus harapan bangsa. Serta pentingnya pemberian materi-materi yang menyangkut pengembangan kepribadian, motivasi berprestasi, dan bagaimana cerdas secara emosional dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bernegara mutlak diperlukan. Terlebih dengan kondisi sosial emosional generasi muda yang terbilang dinamis perlu dibangun kesadaran berpolitik yang merumakan salah satu tujuan dari pendidikan politik itu sendiri.

Tokoh partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tokoh partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus dan kenyataannya, partai politik justru memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada BAB XIII pasal 31 ayat (1) tentang pendidikan politik, menjelaskan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia fungsi-fungsi parpol diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik secara jelas Undang-Undang itu mengatakan, parpol memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik warga negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elite politik. Selebihnya mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang

otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Di Indonesia peran partai politik adalah sebagai pilar penyangga demokrasi. Dalam artian bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Dengan kondisi partai politik yang sehat dan efektif, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum (pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Pemilihan Desa Jatipurwo sebagai lokasi penelitian karena beberapa aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan partisipasi politik warga negara khususnya generasi muda diduga bermasalah. Karena itu permasalahan ini perlu diangkat melalui penelitian ini dengan tujuan melakukan kajian serta pemecahan terhadap

masalah. Berdasarkan observasi awal dilokasi penelitian serta studi literature yang terkait dengan permasalahan di atas didapati fakta permasalahan berupa kurangnya pemahaman terhadap politik khususnya pada generasi muda.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat Jatipurwo Kecamatan Jatipurno dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat kebudayaan, khususnya generasi muda, yang dipadukan dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan pendidikan politik ini akan tercapai keberhasilan dan dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat dan diwujudkan dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Peran Tokoh Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Budaya Dan Partisipasi Politik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN TOKOH PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDADESA JATIPURWO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI.”

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2014: 55), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data”. Hal ini dilakukan supaya penelitian dapat dilakukan dengan baik dan tidak mengalami kesulitan sehingga efektif dan efisien. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri?

2. Bagaimanakah upaya tokoh-tokoh partai politik dalam menyampaikan pendidikan politik bagi generasi muda di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana tanggapan generasi muda terhadap pendidikan politik yang diberikan oleh tokoh partai politik di Desa Jatipurwo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pentingnya pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mendiskripsikan upaya tokoh-tokoh partai politik dalam menyampaikan pendidikan politik bagi generasi muda di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mendiskripsikan tanggapan generasi muda terhadap pendidikan politik yang diberikan oleh tokoh partai politik di Desa Jatipurwo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik
  - a. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat tingkat pendidikan politik generasi muda di Desa Jatipurwo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri.
  - b. Sebagai tambahan literature atau bahan kajian dalam studi ilmu politik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat khususnya generasi muda, terutama dalam membentuk sikap dan tingkah laku politik mereka.

- b. Input bagi tokoh partai politik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam mendidik masyarakat dalam hal politik, dan membuat terobosan baru dalam merumuskan dan menjabarkan program kerjanya yang berkaitan dengan pemberian pendidikan politik kepada generasi muda di Desa Jatipurwo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri.